



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
TAHUN 2024

TONDANO, 30 AGUSTUS 2024

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah untuk tahun berjalan , yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring perkembangan/perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tahun berjalan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa melaksanakan penyesuaian perencanaan dan penganggaran yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja bidang/unsur pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Harapan kami bahwa Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Perubahan serta Implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai lembaga Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,

MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661115 198602 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI TAHUN 2024	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2022 Sampai Tahun 2023	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH	36
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-PD merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Renja PD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD, yang disusun dan dirumuskan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan PD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
5. Telaahan terhadap PerubahanPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja PD, mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan PD, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan PD;
2. Organisasi dan tatalaksana PD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra PD;
5. Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
6. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan PD;
7. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan PD;
8. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
9. PerubahanRKPD tahun rencana;
10. Informasi lain terkait pelayanan PD.

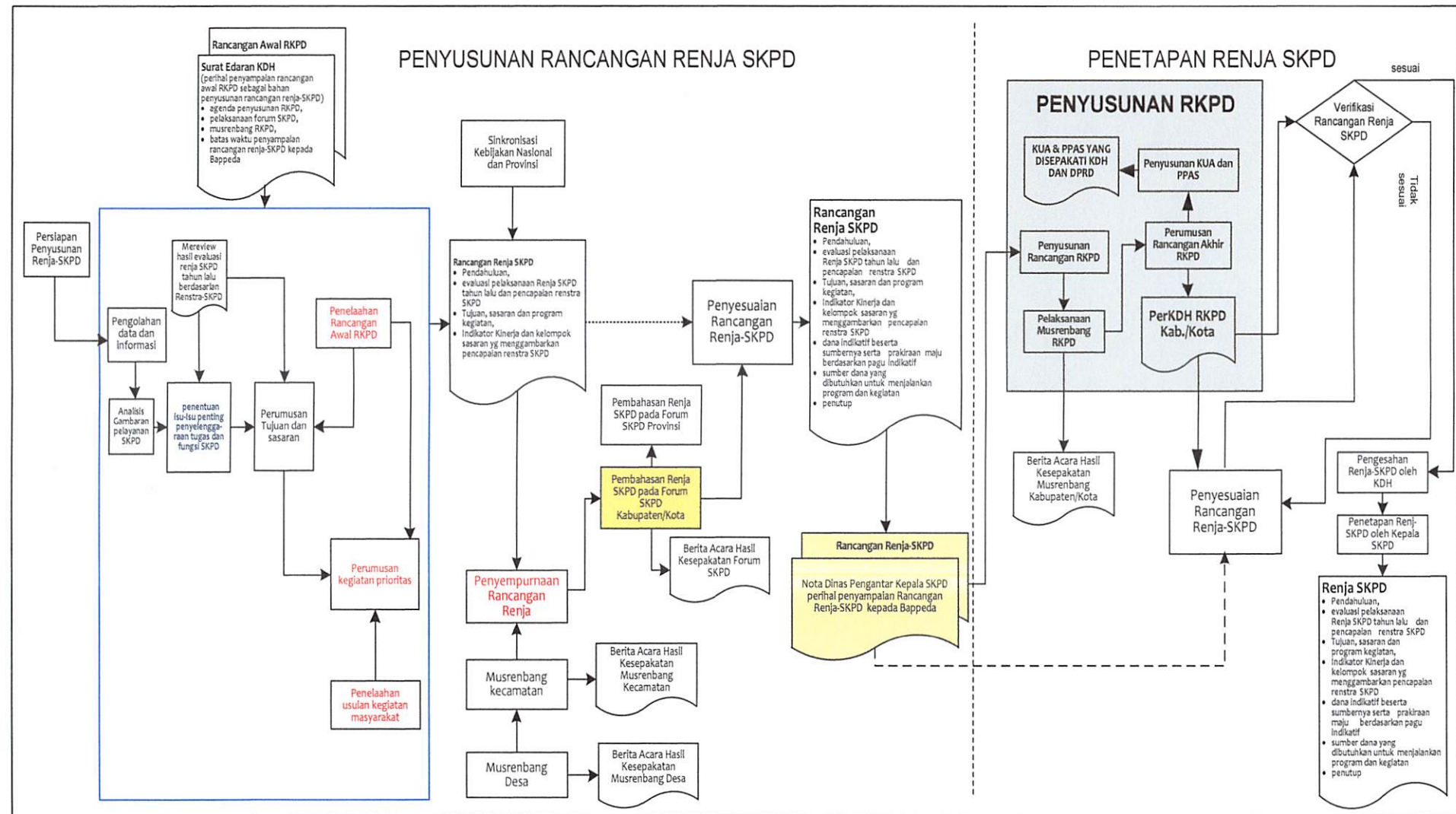
Secara rinci bagan alir tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana digambarkan pada skema tahapan bagan alir penyusunan Renja PD pada Gambar 1.1.

Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan PD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran target sesuai dengan Renstra PD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD Kabupaten Minahasa



Langkah-langkah analisis kinerja pelayanan PD adalah:

1. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi;
2. Melakukan identifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut IKK atau hasil analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
3. Melakukan identifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra PD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
4. Melakukan perhitungan realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
5. Melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, berdasarkan kondisi target menurut Renstra PD dan capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan tahun berjalan, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan PD;
6. Memberikan catatan penting hasil kajian antara target dan realisasi yang dicapai, serta rumusan proyeksi untuk tahun rencana;
7. Bila dalam IKK angka standar atau target besarnya tidak tercantum, maka analisis capaian kinerja selain dibandingkan terhadap target besaran Renstra PD, juga dihubungkan dengan indikator yang terkait dengan target kinerja sesuai kebijakan nasional;
8. Bila dalam Renstra PD tidak tercantum indikator yang sesuai dengan IKK atau target kinerja nasional, maka kondisi pelayanan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan perlu dipetakan (dihitung) mengacu pada indikator IKK atau target kinerja nasional.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa aturan yang mendasari dan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kewenangan Inspektorat Daerah

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan setiap tahun;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan setiap tahun; dan
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditetapkan setiap tahun.
 43. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 hal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
 47. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 48. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 49. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu

- atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan setiap tahun;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan setiap tahun; dan
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditetapkan setiap tahun.
 43. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/IJ tanggal 27 Februari 2020 hal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
 47. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 48. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
 49. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sampai dengan tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Permendagri 86 tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra

Tujuan Strategis Pelayanan Jangka Menengah Tahun 2024-2026 organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa adalah Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan indikator dan target:

1. Indeks Integritas : > 85,00
2. Indeks Reformasi Birokrasi: B
3. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi): 3 Unit Kerja
4. Jumlah unit kerja yang berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) : 3 Unit Kerja

Hasil evaluasi terhadap kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 menunjukkan pencapaian sebagai berikut:
Sasaran Strategis

Sasaran Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima, dengan indikator dan target :

- Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi : Target 2 Tingkat Capaian
- Indeks Manajemen Risiko; Target 3 Tingkat Capaian
- Indeks MCP-Korsupgah Korupsi; Target 85 Tingkat Capaian 30
- Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, Target 3 Tingkat Capaian
- Maturitas Implementasi Sstem Penegendalian Intern Pemerintah, Target 3 Tingkat Capaian
- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Target WTP Tingkat Capaian WTP
- Presentase Perangkat Daerah yang memiliki Predikat SAKIP minimal Baik (B), Target 75% Tingkat Capaian 60,6%
- Survey Kepuasan Masyarakat Pengawasan Inspektorat, Target Sangat Baik Tingkat Capaian Baik

Secara ringkas hasil rekapitulasi terhadap pelaksanaan rencana kerja (Renja) dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sampai dengan tahun berjalan diuraikan sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Minahasa

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan,sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	1	INSPEKTORAT DAERAH											
6	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Penunjang Unsur pengawasan Nilai IKM Nilai SAKIP	Sangat Baik A 4 A	Baik B 4 BB	87,5 3,5 BB 78,5	Sangat Baik A 4 A	Baik B 3.5 BB	87,5 7,85			
6	1	01	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat)	A(93,00)	BB(78,50)	A(90,50)	BB(78,50)	85	A(90,50)	BB(78,50)	BB(78,50)
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku	32	7	11	7	64	11	7	64	
6	1	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	2	4	2	50	4	
6	1	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	1	1	100	1	
6	1	01	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3		1			1	
6	1	01	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	3	1	1	1	100	1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan,sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			1		SKPD	Koordonasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
6	1	01	2.0 1	05	KoordInasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3		1			1		
6	1	01	2.0 1	06	KoordInasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3		1			1		
6	1	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun	14	2	5	2	40	5		
6	1	01	2.0 2		Administrasi Keuangan	Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak keuangannya	100	50	100	50		100	50	50
						Persentase dokumen tanggapan hasil pemeriksaan yang tersampaikan	100	50	100	50	50	100	50	50
						Persentase pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik	100	50	100	50		100	50	50
6	1	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPM gaji dan tunjangan yang diterbitkan	84	43 orang/bulan	43 orang/bulan	43 orang/bulan		43 orang/bulan		
						Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN sesuai peraturan perundang-undangan	129							
6	1	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPPD yang diterbitkan	450	75	150	75	50	150		
6	1	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	315	55	105	55	52	105		
6	1	01	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	1	2	1	50	2		
6	1	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan	3	1		1		1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						SKPD	Kuangan Akhir Tahun SKPD							
6	1	01	2.0	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen/bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	1	2	1	50	2		
6	1	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	51	8	17	8	47	17		
6	1	01	2.0	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pe laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6		1			1		
6	1	01	2.0		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik</i>	90	60	90	60	60	90	60	60
6	1	01	2.0	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	1	1	1	100	1		
6	1	01	2.0	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3		1			1		
6	1	01	2.0	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3		1			1		
6	1	01	2.0	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6	1	2	1	50	2		
6	1	01	2.0	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	1	2		50	2		
6	1	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6		2			2		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	01	2.0	07	3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6	1	2	1		2		
6	1	01	2.0		5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	100	50	100	50	50	100		
6	1	01	2.0	01	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1		1 unit			1 unit		
6	1	01	2.0	02	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	86		1 Paket			1 Paket		
							Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu tersedia	86							
6	1	01	2.0	03	5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	6	12	6	50	12		
6	1	01	2.0	04	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	1	1	1	100	1		
6	1	01	2.0	05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	36	6	12	6	50	12		
6	1	01	2.0	09	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti diklat	36		12			12		
							Jumlah ASN Mengikuti PKS (in house training)								
6	1	01	2.0	10	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	129	43	43	43	100	43		
6	1	01	2.0	11	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	129	43	43	43	100	43		
6	1	01	2.0		6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan layanan administrasi administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	100	50	100	100	50	100		
6	1	01	2.0	01		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	3	1	1	1		1		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			6			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan								
6	1	01	2.0	02	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1	1	1		1		
						a. Map (Buah)		1.428	334	668	334		668		
						b. Odner Buah		124	35	70	35		70		
						c. Ballpoint (Buah)		93	18	36	18		36		
						d. Isi Stepler (Dos)		4	2	3	2		3		
						e. Binder Clips (Dos)		273	15	30	15		30		
						f. Kertas HVS F4 (Rim)		195	30	59	30		59		
						g. Kertas HVS A4 (Rim)		139	30	60	30		60		
						h. Tinta Warna (Botol)		28	6	12	6		12		
						i. Tinta Hitam (Botol)		62	15	25	15		25		
						j. Tinta/Toner Printer (Buah)		15	1	3	1		3		
						k. Buku Tulis (Buah)		-	10	10	10		10		
						l. Amplop Coklat Folio (Pak)		-	5	5	5		5		
						m. Paper Clip (Dos)		30	6	6	6		6		
						n. Kertas Cover (Rim)		6	2	2	2		2		
						o. Lakban		30	5	5	5		5		
						p.Cutter		6							
6	1	01	2.0	03	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1	1	1		1		
						a. Sapu Lantai		-							
						b. Kaset Kaki		-							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan,sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						c. Keranjang Sampah	-							
						d. Ember	-							
						f. Gayung	-							
						g. Skep Sampah	-							
						h. Piring	4							
						i. Mangkok	2							
						j. Kemoceng	2							
						k. Sendok/Garpu	4							
6	1	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1	1	1		1		
						a. Aqua Galon 19 Liter	360	60	120	60		120		
						b. Kopi Sachet	360	60	120	60		120		
						c. Gula	72	12	24	12		24		
						d. Minuman Kemasan	72	12	24	12		24		
						e. Kopi Bubuk	36	6	12	6		12		
6	1	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1	1	1		1		
						a. Cetakan Baliho	300	50	100	50		100		
						b. Penggandaan Dokumen	55.350	10000	18450	10000		18450		
6	1	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Penerbit	24 Dokumen	48 Dokumen	24 Dokumen		48 Dokumen		
6	1	01	2.0	07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan			1			1		
6	1	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6	12	6		12		
						a. Jumlah Paket Makanan Tersedia	480	100	160	100		160		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						b. Jumlah Paket Snack Tersedia	480	100	160	100		160		
						c. Jumlah air kemasan tersedia (Galon)	30							
6	1	01	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lapoaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	12	25	12		25		
6	1	01	2.0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3		1			1		
6	1	01	2.0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	JumlahDokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1			1		
6	1	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	75	30	70	30	50	70	30	30
6	1	01	2.0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia								
						a. Kendaraan Roda 4								
						b. Kendaraan Roda 2								
6	1	01	2.0	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Tersedia			6			6		
						a. Almari Arsip (Buah)	2							
						b. Meja Kerja Pejabat (Buah)	6		4			4		
						c. Kursi Kerja Pejabat (Buah)	9							
						d. Meja 1 Biro Tersedia (Buah)	-		1			1		
						e. Meja 1/2 Biro Tersedia (Buah)	-		1			1		
						f. Kursi Rapat (Buah)	-							
						g. Meja Rapat (Buah)	-							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		h. Meja dan Kursi Tamu/Sofa (Set)	1							
6	1	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		3		
					a. Personal Computer (Unit)	5		1		
					b. Lap Top (Unit)	5				
					c. LCD Proyektor/Infokus (Unit)	1				
					d. Lemari Es (Unit)	-				
					e. Printer (Unit)	1				
					f. Scanner (Unit)	1				
					g. Mesin Photo Copy (Unit)	-				
					h. Kamera (Unit)	-				
					i. Televisi (Unit)	-				
					j. Brandkas (Unit)	-				
					k. Mikrotik (Unit)	-				
					l.Hammer Test	3		1		
					m.Distance Meter Electronic	3		1		
6	1	01	2.0	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Tersedia				
					a.					
					b.					
6	1	01	2.0	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia (Unit)	2			
6	1	01	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1		
					a. Gorden(meter)					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan,sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		b. Tabung Pemadam Kebakaran(buah)											
		c. Air Conditioner (unit)	1										
6	1	01	2.0	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedia						
		a. Lampu hias	3										
		b.											
6	1	01	2.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan	100	50	100	50	50	
6	1	01	2.0	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	36	6	12	6		
						Jumlah Materai Tersedia (buah)	780	160	260	160			
6	1	01	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						
						a. Jasa Internet Up to 50 Mbps Per Bulan	36	6	12	6		12	
						b. Jasa Layanan Air Bersih	-	0	0	0		0	
						b. Jasa Layanan Air Listrik	36	5100	5100	5100		5100	
6	1	01	2.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor yang disediakan	36	6	12	6		12
6	1	01	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan sesuai RKBMD		80	80	80		80
6	1	01	2.0	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		7	7	7		7

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan,sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						a. Kendaraan Roda 4				1			1		
						b. Kendaraan Roda 2				6			6		
6	1	01	2.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	36	12	12	12		12		
						a. Personal Computer/Lap Top		30		10			10		
						b. Printer		6		2			2		
6	1	01	2.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan	80							
6	1	01	2.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan								
						a. Gorden									
						b. Tabung Pemadam Kebakaran									
6	1	01	2.0	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan								
						a. Lampu hias									
						b.									
6	1	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	90%	80.49	85	80.49	80.49	90	80.49	80.49
							Persentase rekomendasi atas hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	80%	52,54%	50	52,54%	52,54%	80%	52,54%	52,54%
							Persentase Perangkat Daerah Yang Dievaluasi akuntabilitas kinerjanya	100%	100%	100	100	100%	100%	100%	100%
6	1	02	2.0			Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan wajib yang	90	0	80	0		80		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				1		Internal	dilaksanakan							
							Persentase program prioritas nasional yang mendapatkan pengawasan	100		100		100		
6	1	02	2.0	01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	24	4	8	4		8	
							Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	174	58	58	58		58	
							Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	3	1	1	1		1	
							Jumlah Laporan Monev Pelayanan Publik	3	1	1	1		1	
							Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan	36		12		12		
6	1	02	2.0	02	1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	173		58		58		
							Jumlah LHP Keuangan Dana BOS	75		25		25		
6	1	02	2.0	03	1	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6		2		2		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKA Perubahan Perangkat Daerah	348		116		116		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	3	1	1	1		1	
							Jumlah Laporan Reviu RPJMD Perubahan	1	0	0	0		0	
							Jumlah Laporan Reviu RPJPD Perubahan	1	0	0	0		0	
							Jumlah Laporan Reviu Renstra PD/Perubahan Renstra PD	1	0	0	0		0	
							Jumlah Laporan Reviu Renja PD/ Perubahan Renja PD	348		116		116		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	12	2	4	2		4		
						Jumlah Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	12	2	4	2		4		
						Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus	48	8	16	8		16		
						Jumlah Laporan Reviu LPPD	3	1	1	1		1		
6	1	02	2.0	04	1	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	174		58		58		
6	1	02	2.0	05	1	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	66		22		22		
						Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM Desa	66		22			22		
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa	3	0	0	0		0		
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	3	0	0	0		0		
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Ranperdes APBDesa	3	0	0	0		0		
6	1	02	2.0	06	1	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang pelaksanaannya merupakan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya	6	1	2	1	2		
6	1	02	2.0	07	1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	4	0	0	0	0		
						Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	6	1	2	1		2		
6	1	02	2.0		2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	50	100	50	50	100	50
						Persentase Hasil Pengawasan yang berindikasi	80		60			60		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kerugian daerah yang diselesaikan									
		Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Yang Dilaksanakan	100	50	90	50	50	100	50		
6	1	02	2.0	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian daerah	36		12		
6	1	02	2.0	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif	15	4	4	4	
					Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat		6	12	6	12	
					Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya		39	6	13	13	
					Jumlah laporan pengawasan vaksin covid 19		12	4		4	
					Jumlah laporan probity audit dan audit kepatuhan		15	5		5	
					Jumlah laporan reviu pajak daerah		3	1		1	
					Jumlah laporan reviu manajemen ASN		3	1		1	
					Jumlah laporan reviu tata kelola PBJ		3	1		1	
					Jumlah laporan reviu perijinan		3	1		1	
6	1	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aktifitas pengawasan yang didukung NSPK yang baku	100	50	100	50	50
						Persentase urusan perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	100	50	100	50	50
						Persentase Pemenuhan dokumen MCP-Korsupgah Korupsi	95	30	80	30	30
						Persentase perangkat daerah yang menyusun	100	75	75	75	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan menetapkan Risk Register								
6	1	03	2.0	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	405	60	125	60	48	125	60
6	1	03	2.0	1	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rancangan Kebijakan Teknis pengawasan yang disusun	390	60	120	60		120	
6	1	03	2.0	1	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rancangan Kebijakan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	15	5	5	5		5	
6	1	03	2.0	2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD penyelenggara urusan pemerintahan konkuren yang mendapatkan pendampingan asistensi	100%	50	100	50	50	100	50
						Jumlah asistensi yang dilaksanakan	21	4	7	4	57	7	57	
						Jumlah pendampingan yang operasional	7	1	2	1	50	2	50	
6	1	03	2.0	2	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan maturitas SPIP	4	1	1	1		1	
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi peningkatan kapabilitas APIP	4	1	1	1		1		
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	174	58	58	58		58		
6	1	03	2.0	2	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi	3	1	1	1		1	
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi	3	1	1	1		1		
6	1	03	2.0	2	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi	3	1	1	1		1	
						Jumlah Laporan Hasil Verifikasi LHKPN/LHKS	4	1	1	1		1		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir periode Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, kegiatan, sub kegiatan dan keluaran s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (2024)	Realisasi Renja PD tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024) (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	1	03	2.0	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Satgas UPP Saber Pungli yang terfasilitasi	3	1	1			1		
						Jumlah laporan hasil pendampingan Survey Penilaian Integritas (SPI)	3	1	1			1		
						Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System, dan Benturan Kepentingan	3	1	1			1		
						Jumlah laporan hasil penilaian mandiri Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1	0	0			0		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, Inspektorat Daerah merupakan Satuan Kerja penunjang pemerintah daerah yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Inspektorat Daerah, membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan **Fungsi** :

1. Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Perumusan kebijakan , pendampingan, dan asistensi;
3. Penyediaan dukungan unsur pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, RPJMN Tahun 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa 1) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi, 2) Indeks Manajemen Risiko, 3) Indeks MCP-Korsupgah Korupsi, 4) Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, 5) Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , 6) Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ,7) Persentase perangkat daerah yang memiliki predikat SAKIP minimal B , dan 8) Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah unsur pengawasan) (rincian sebagaimana tabel 2.2.)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Daerah
Kabupaten Kabupaten Minahasa Tahun 2024 (Triwulan II)

NO	Indikator Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n+2)		Tahun 2024 (thn n)		Tahun 2025 (thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)
1	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	✓		3	3	3		1				
2.	Indeks Manajemen Risiko	✓		2	3	3		2				
3.	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	✓		85	88	90		30				
4.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah	✓	✓ Permendagri 18 Tahun 2020	Level 3	Level 3	Level 3						
5.	Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	✓	✓ Permendagri 18 Tahun 2020	Level 3	Level 3	Level 3						
6.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	✓	✓ Permendagri 86 Tahun 2017	WTP	WTP	WTP		WTP				
7.	Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP Minimal Baik (B)			75	80	90		60,6				
8.	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan	✓		Sangat Baik (4)	Sangat Baik (4)	Sangat Baik (4)		Baik (3,5)				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa secara umum adalah sebagaimana sudah diuraikan di atas.

Hasil identifikasi terhadap permasalahan secara lebih detail sebagaimana diuraikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Gambaran Pelayanan SKPD					
1. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2	IKK (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	- Pejabat fungsional auditor belum tersedia - Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian. - Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal - Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal - Standar Operasional dan Prosedur	- Kegiatan pembentukan jabatan fungsional auditor dan fungsional lainnya oleh lembaga terkait terbatas - Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar. - Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas.	Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan menjadi level 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pengawasan belum disiapkan secara maksimal - Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan - Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan pembentukan pejabat fungsional masih terbatas.		
2. Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	IKK (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)	- Pejabat fungsional auditor yang tersedia masih sedikit - Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian. - Implementasi pengawasan sesuai	- NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan. - Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu ditingkatkan menjadi level 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal - Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal - Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal - Kegiatan-kegiatan <i>mandatory audit</i> terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan - Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas. - NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.		
3. Indeks MCP-Korsupgah Korupsi	83		- Fungsi <i>pembinaan dan pengawasan</i> MCP-	- Objek pemeriksaan belum optimal dalam	Indeks MCP-Korsupgah Korupsi perlu ditingkatkan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Korsupgah Korupsi belum optimal	pemenuhan dokumen penilaian MCP- Korsupgah Korupsi	
4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)	.	- Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya - Objek pemeriksaan belum maksimal dalam mengelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menyiapkan dan atau mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dengan baik - Perangkat daerah/ objek pemeriksaan lainnya belum mengimplementasikan hasil-hasil temuan BPK/APIP dalam pengelolaan kegiatannya	Opini BPK perlu dipertahankan
5. Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi	1		- Perangkat Daerah - Kegiatan khusus Pencegahan Korupsi	- Perangkat Daerah belum maksimal dalam penerapan Efektifitas	Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi perlu ditingkatkan dari Indeks 1 menjadi 3

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini (Desember 2023)	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			belum dilaksanakan secara optimal	Pencegahan Korupsi - Bimbingan dan asistensi khusus penerapan Efektifitas Pencegahan Korupsi belum dilaksanakan secara optimal	
6. Indeks Manajemen Risiko	2		- Perangkat Daerah - Kegiatan khusus penerapan Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara optimal	- Perangkat Daerah belum maksimal dalam penyusunan risk register - Dimbingan dan asistensi khusus Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara optimal	Indeks Manajemen Risiko perangkat daerah perlu ditingkatkan
7. Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP minimal baik (B)	60,6		- Terdapat Kegiatan penilaian / evaluasi SAKIP PD - -Terdapat aparatur sebagai Evaluator	- Terdapat kebijakan nasional - -Kesiapan Perangkat Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah perlu ditingkatkan (Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal B hanya 20 PD dari 33 PD)
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Unsur Pengawasan	Sangat Baik	IKM	- Terdapat SOP survey kepuasan	- Terdapat kebijakan Nasional	Belum dilaksanakannya Survey kepuasan masyarakat atas layanan pembinaan dan pengawasan secara kontinyu/berkala

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD maka permasalahan-permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

Permasalahan Berdasarkan Kajian Pelayanan PD

1. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih rendah (level 2) dan belum mencapai target nasional level 3 Internal

- a) Pejabat fungsional auditor belum tersedia
- b) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.

Eksternal

- a) Kegiatan-kegiatan bimbingan teknis pengawasan (Pemeriksaan kinerja, Reviu-reviu, evaluasi, dll) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksternal membutuhkan co-sharing biaya yang cukup besar.
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis pengawasan oleh BPKP terbatas
- ##### 2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP mencapai level 2, belum mencapai target nasional level 3 (66.7%)

Internal

- a) Pejabat fungsional auditor belum tersedia
- b) Pejabat fungsional yang tersedia masih ada yang belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan, seperti pemeriksaan berbasis kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, investigasi, reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, Evaluasi, dan Penilaian.
- b) Implementasi pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia/kode etik pemeriksaan belum optimal
- c) Pemeriksaan berbasis risiko belum diterapkan secara optimal
- d) Standar Operasional dan Prosedur pengawasan belum disiapkan secara maksimal
- e) Kegiatan-kegiatan *mandatory audit* terkait dengan pengawasan masih banyak yang belum dilaksanakan
- f) Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional masih terbatas.
- g) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.

Eksternal

- a) NSPK dan atau Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkup perangkat daerah

- belum disusun/dimutakhirkan dan/atau disosialisasikan dan/atau diimplementasikan.
- b) Perkembangan nasional terkait dengan Kebijakan Pengawasan.
 3. Indeks MCP-Korsupgah Korupsi masih perlu ditingkatkan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut antara lain adalah:
 - a) Fungsi *pembinaan dan pengawasan* MCP-Korsupgah Korupsi belum optimal
 - b) Objek pemeriksaan belum optimal dalam pemenuhan dokumen penilaian MCP-Korsupgah Korupsi
 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dipertahankan pada predikat WTP
 - a) Fokus pemeriksaan dari BPK yang tidak tetap setiap tahunnya;
 - b) Objek pemeriksaan belum maksimal dalam mengelola keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum menyiapkan dan atau mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal dengan baik.
 - c) Perangkat daerah/ objek pemeriksaan lainnya belum mengimplementasikan hasil-hasil temuan BPK/APIP dalam pengelolaan kegiatannya
 5. Indeks efektifitas pencegahan korupsi perlu ditingkatkan dari indeks 1 menjadi 3
Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya pencapaian tersebut antara lain adalah
 - a) Perangkat Daerah belum maksimal dalam penerapan Indeks efektifitas pencegahan korupsi
 - b) Bimbingan dan asistensi khusus dalam penerapan Indeks efektifitas pencegahan korupsi
 6. Indeks manajemen risiko perlu ditingkatkan dari indeks 2 menjadi 3
Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya pencapaian tersebut antara lain adalah
 - a) Perangkat Daerah dalam penyusunan manajemen risiko
 - b) Bimbingan dan asistensi khusus dalam penerapan manajemen risiko
 7. Persentase Perangkat Daerah Dengan Predikat SAKIP Baik (B) masih harus ditingkatkan 60,6 %)
 - a) Terdapat kegiatan penilaian/Evaluasi SAKIP PD.
 - b) Terdapat kebijakan nasional
 - c. Kesiapan Perangkat Daerah.
 8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pembinaan
 - a) Terdapat SOP survey kepuasan
 - b) Terdapat kebijakan nasional

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2024 adalah Tusi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026.

- Jumlah program dan jumlah kegiatan, adalah 3 (tiga) program, dan 12 (Dua Belas) kegiatan, dan 74 (Tujuh Puluh Empat) sub kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah tersebar di seluruh wilayah kabupaten Minahasa

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp11.314.266.470

Sebagaimana uraian dibawah ini :

Tabel 3.1.
Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Minahasa

Nama PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang			Target Capaian Kinerja
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			10.016.785.000	9.867.900.157	11.314.266.470	1.294.481.470				
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			10.016.785.000	9.867.900.157	11.314.266.470	1.294.481.470			14.222.489.927	
6	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Penunjang Unsur pengawasan Nilai IKM Nilai SAKIP	Sangat Baik A 4 B	Sangat Baik A 4 B	8.690.568.000	8.548.705.557	9.764.885.870	19.890.000	Kabupaten Minahasa	Sangat Baik A 4 B	11.722.261.577
6	1	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat)	A	A	19.922.764	4.918.410	4.918.410	-15.004.354		A(90,50)	19.268.050
						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang baku	10	10	4.964.892	0	0	-4.964.892		10	
6	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4						4	4.779.450
6	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1						1	294.300
6	1	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1						1	
6	1	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1						1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
6	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordonasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1					1	
6	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	485.936	478.410	478.410	-7.526	1	
6	1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun	1	1	14.471.936	4.440.000	4.440.000	-10.031.936	1	14.194.000
6	1	01	2.02		Adminlstrasi Keuangan	Persentase ASN yang terprnuhl hak-hak keuangannya	100	100	8.103.267.117	8.032.916.660	9.214.372.973	1.111.105.856	100	10.754.222.749
						Persentase dokumen tanggapan hasil pemeriksaan yang tersampaikan	100	100					100	
						Persentase pengelolaan keuangan yang didukung administrasi yang baik	100	100					100	
6	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 orang/bulan	43 orang/bulan	8.100.416.653	8.031.010.790	9.212.467.103	1.112.050.450	43 orang/bulan	8.100.416.653
6	1	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150	150	983.394	981.795			150	779.492
6	1	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105	105					105	107.115
6	1	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	450.000			-450.000	2	1.150.000
6	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	463.822	462.315	462.315	-1.507	1	1.150.000
6	1	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen/bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2					2	77.700
6	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	17	17	476.624			-476.624	17	133.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
6	1	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	JumlahDokumen pe laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	476.624	461.760	461.760	-14.864	2	66.600
6	1	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang didukung administrasi yang baik	90	90					90	1.349.800
6	1	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1					1	66.600
6	1	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1					1	
6	1	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1					1	
6	1	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2					2	
6	1	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	476.624	444.000	444.000	-32.624	12	1.283.200
6	1	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2					2	
6	1	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2	2					2	
6	1	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawalan yang didukung administrasi yang baik	100	100	140.098.176	114.520.000	114.244.000	-25.854.176	100	511.320.000
6	1	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit					1 unit	
6	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta atribut kelengkapannya	86 Paket	86 Paket					86 Paket	81.141.000
						Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu tersedia								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang		Target Capaian Kinerja
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
6	1	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12						12	
6	1	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1						1	
6	1	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12						12	
6	1	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti diklat	43	43	139.198.176	114.520.000	114.520.000	-29.954.176		43	427.254.000
						Jumlah ASN Mengikuti PKS (in house training)									
6	1	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	43	43	450.000			-450.000		43	1.125.000
6	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	43	43						43	1.800.000
6	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan layanan administrasi administrasi umum yang didukung administrasi yang baik	100	100	158.457.195	157.760.827	157.760.827	-696.368		100	160.765.978
6	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	2.500.000	2.497.833	2.497.833	-2.167		1	2.498.833
6	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	23.176.000	23.332.200	23.332.200	154.200		1	23.173.470
						a. Map (Buah)	668	668						668	
						b. Odner Buah	70	70						70	
						c. Ballpoint (Buah)	36	36						36	
						d. Isi Stepler (Dos)	3	3						3	
						e. Binder Clips (Dos)	30	30						30	
						f. Kertas HVS F4 (Rim)	59	59						59	
						g. Kertas HVS A4 (Rim)	60	60						60	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						b. Penggandaan Dokumen	18450	18450					18450	
6	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	4.800.000	4.800.000	4.800.000		48 Dokumen	4.800.000
6	1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan	1	1					1	2.502.122
6	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	14.520.000	14.513.250	14.513.250	-5.750	12	14.513.250
						a. Jumlah Paket Makanan Tersedia	160	160					160	
						b. Jumlah Paket Snack Tersedia	160	160					160	
						c. Jumlah air kemasan tersedia (Galon)								
6	1	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	25	95.000.000	93.694.000	93.694.000	-1.306.000	25	94.804.000
6	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1					1	
6	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	JumlahDokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1					1	
6	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	70	70	77.500.000	85.478.900	85.478.900	7.978.900	70	88.130.000
6	1	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia								
						a. Kendaraan Roda 4								
						b. Kendaraan Roda 2								
6	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket /Unit Mebel yang disediakan	1	1	15.000.000	13.586.400	33.586.400	18.586.400	1	12.650.000
						a. Almari Arsip (Buah)								
						b. Meja Kerja Pejabat (Buah)	4	4					4	
						c. Kursi Kerja Pejabat (Buah)								
						d. Meja 1 Biro Tersedia (Buah)	1	1					1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						h. Tinta Warna (Botol)	12	12					12	
						i. Tinta Hitam (Botol)	25	25					25	
						j. Tinta/Toner Printer (Buah)	3	3					3	
						k. Buku Tulis (Buah)	10	10					10	
						l. Amplop Coklat Folio (Pak)	5	5					5	
						m. Paper Clip (Dos)	6	6					6	
						n. Kertas Cover (Rim)	2	2					2	
						o. Lakban	5	5					5	
6	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1	750.000	735.927	735.927	-14.073	1	754.000
						a. Sapu Lantai								
						b. Kaset Kaki								
						c. Keranjang Sampah								
						d. Ember								
						f. Gayung								
						g. Skep Sampah								
						h. Piring								
						i. Mangkok								
						j. Kemoceng								
						k. Sendok/Garpu								
6	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	7.241.080	7.719.717	7.719.717	478.837	1	7.239.753
						a. Aqua Galon 19 Liter	120	120					120	
						b. Kopi Sachet	120	120					120	
						c. Gula	24	24					24	
						d. Minuman Kemasan	24	24					24	
						e. Kopi Bubuk	12	12					12	
6	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	10.468.115	10.467.900	10.467.900	-215	1	10.481.550
						a. Cetakan Baliho	100	100					100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
						e. Meja 1/2 Biro Tersedia (Buah)	1	1				1	
						f. Kursi Rapat (Buah)							
						g. Meja Rapat (Buah)							
						h. Meja dan Kursi Tamu/Sofa (Set)							
6	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	4	60.000.000	51.892.500	51.892.500	-8.107.500	75.480.000
						a. Personal Computer (Unit)	1	1				1	
						b. Lap Top (Unit)							
						c. LCD Proyektor/Infokus (Unit)							
						d. Lemari Es (Unit)							
						e. Printer (Unit)	1	1				1	
						f. Scanner (Unit)							
						g. Mesin Photo Copy (Unit)							
						h. Kamera (Unit)							
						i. Televisi (Unit)							
						j. Brandkas (Unit)							
						k. Mikrotik (Unit)							
						l.Hammer Test	1	1				1	
						m.Distance Meter Electronic	1	1				1	
6	1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan							
						a. Gorden							
						b. Tabung Pemadam Kebakaran							
6	1	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Operasional Tahunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan	100	100	120.949.500	102.945.500	117.945.000	-3.004.500	117.945.000
6	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12	12	3.000.000	3.500.000	3.500.000	500.000	3.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
6	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	14.749.500	18.445.000	18.445.000	3.695.500	12	18.445.000
						a. Jasa Internet Up to 50 Mbps Per Bulan	12	12					12	
						b. Jasa Layanan Air Bersih	0	0					0	
						b. Jasa Layanan Air Listrik	5100	5100					5100	
6	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas Kantor yang disediakan	12	12	103.200.000	81.000.000	96.000.000	-7.200.000	12	96.000.000
6	1	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan layanan Pemeliharaan sesuai RKBMD</i>	90	90	69.420.000	69.260.000	69.260.000	-160.000	90	69.260.000
6	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	7	60.740.000	60.740.000	60.740.000		7	60.740.000
						a. Kendaraan Roda 4	1	1					1	
						b. Kendaraan Roda 2	6	6					6	
6	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	12	12	8.860.000	8.520.000	8.520.000	-160.000	12	8.520.000
						a. Personal Computer/Lap Top	10	10					10	
						b. Printer	2	2					2	
6	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mendapatkan Pemeliharaan	1	1					1	
6	1	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	85	85	1.215.467.000	1.208.914.000	1.439.100.000	172.733.000	85	2.113.725.000
						Persentase rekomendasi atas hasil pengawsan APIP yang ditindaklanjuti	75	75					75	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						Perubahan Renja PD								
						Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran								
						Jumlah Laporan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa								
						Jumlah Laporan Reviu Dana Alokasi Khusus								
						Jumlah Laporan Reviu LPPD								
6	1	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	1	18.900.000	17.950.000	17.950.000	-275.000	1	18.550.000
6	1	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	22	231.000.000	230.400.000	378.800.000	-950.000	22	302.700.000
						Jumlah LHP Kinerja Pengelolaan Keuangan BUM Desa								
						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa								
						Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa								
6	1	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	2	2	18.500.000	17.025.000	17.025.000	-1.475.000	2	13.000.000
6	1	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3	3	58.992.000	58.300.000	58.300.000	-692.000	3	361.550.000
						Jumlah laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP								
6	1	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pengawasan yang berindikasi kerugian daerah	70	70	116.800.000	114.264.000	145.350.000	28.550.000	70	609.900.000
						Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100					100	
						Persentase pengawasan dengan	100	100					100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
						<i>tujuan tertentu yang dilaksanakan</i>								
						<i>Persentase program prioritas nasional yang mendapatkan pengawasan</i>	100	100					100	
6	1	02	2.01	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian daerah yang ditangani	12	12	27.700.000	25.914.000	57.000.000	29.300.000	12	87.200.000
6	1	02	2.01	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	29	29	89.100.000	88.350.000	88.350.000	-750.000	29	522.700.000
6	1	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase aktifitas pengawasan yang didukung NSPK yang baku	100	100	113.750.000	110.280.600	110.280.600	3.469.400	100	386.503.350
						Persentase pemenuhan dokumen MCP-Korsupgah Korupsi	90	90					90	
						Persentase perangkat daerah yang menyusun dan menetapkan Risk Register	90	90					90	
						Persentase urusan perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	100	100					100	
6	1	03	2.01		<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</i>	<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan yang ditetapkan</i>	125	125	1.500.000	732.600	732.600	-767.400	125	732.000
6	1	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis yang disusun	120	120	750.000	732.600	732.600	-17.400	120	732.000
6	1	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	5	5	750.000			-750.000	5	
6	1	03	2.02		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Persentase OPD penyelenggara urusan pemerintahan konkuren yang mendapatkan pendampingan asistensi</i>	100	100	112.250.000	109.548.000	109.548.000	-2.702.000	100	385.770.750
6	1	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah	58	58	15.000.000	14.208.000	14.208.000	-2.702.000	58	75.615.750
6	1	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi,	Jumlah Perangkat Daerah yang	58	58	9.450.000	8.500.000	8.500.000	-950.000	58	54.630.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
					dan Penilaian Reformasi Birokrasi	dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi								
6	1	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Terintegrasi	4	4	18.900.000	18.550.000	18.550.000	-350.000	4	31.800.000
6	1	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	58	58	69.900.000	68.290.000	68.290.000	-610.000	58	233.725.000
									10.019.785.000	9.867.900.157	11.314.266.470	1.294.481.470		14.222.489.927

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 merupakan penyempurnaan Renja sesuai Renja Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024

Dalam hal anggaran daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah sesuai Rencana Kerja maka penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran atau pagu yang ditetapkan dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja yang ditetapkan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-1, dengan pengecualian terdapat kebijakan nasional atau Daerah yang memungkinkan terjadinya penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan di luar Renja Perubahan .

Tondano, 30 Agustus 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MINAHASA, 



MAUDY N. LONTAAN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661115 198602 2 002